



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian, analisis, serta kajian pustaka pada film dokumenter *Jakarta Unfair*, maka dapat diperoleh kesimpulan jika film ini lebih banyak merepresentasikan kemiskinan struktural dan natural di perkotaan. Perlu diketahui bahwa kemiskinan struktural terjadi karena faktor orang lain atau sesuatu yang berasal dari luar diri. Sedangkan, kemiskinan natural terjadi karena faktor alam atau sumber daya manusia. Representasi kemiskinan di perkotaan pada film *Jakarta Unfair* dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Penggambaran bentuk kemiskinan perkotaan berasal dari orang yang tidak memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan ada keterpaksaan dalam menjalaninya. Pahruji, Supri, dan Suhadi adalah orang yang tidak memiliki pilihan itu meski mereka mencoba melawan.
- 2) Penggambaran bentuk kemiskinan perkotaan merupakan warga negara yang patuh dan taat aturan kebijakan dari pemerintah kota tetapi tinggal di wilayah yang dilarang. Mereka tetap membayar pajak dan biaya utilitas yang disediakan pemerintah kota.
- 3) Penggambaran bentuk kemiskinan perkotaan berasal dari kebijakan tata kelola kota yang salah sasaran. Pahruji contohnya, Seorang nelayan yang terpaksa tinggal di rusun yang jauh dari laut.

- 4) Penggambaran bentuk kemiskinan perkotaan berasal dari kebijakan pemerintah kota yang bersifat sewenang-wenang. Ini terjadi karena ada ketimpangan secara struktur sehingga menempatkan warga sebagai objek.
- 5) Penggambaran bentuk kemiskinan perkotaan berasal dari hegemoni pemerintah kota dalam hukum. Terlihat dalam upaya hukum Supri yang akhirnya tidak dihiraukan pemerintah Jakarta karena tetap melakukan penggusuran.
- 6) Penggambaran bentuk kemiskinan perkotaan berasal dari tingkat pendapatan yang rendah karena tidak memiliki kemampuan serta tidak berpendidikan tinggi sehingga pendapatan habis untuk konsumsi.
- 7) Penggambaran bentuk kemiskinan berasal dari kebijakan pembangunan pemerintah kota mengabaikan manusia justru menimbulkan kesenjangan ekonomi dan tidak ada pemerataan distribusi pendapatan.

5.2 SARAN

5.2.1 SARAN AKADEMIS

Setelah penelitian ini diharapkan ada penelitian lanjutan terkait film dokumenter dan isu tentang kemiskinan di perkotaan dari sudut pandang tokoh dalam film atau Pemerintah DKI Jakarta. Hal ini untuk melengkapi penelitian ini yang hanya menelaah tanda dan simbol untuk merepresentasikan kemiskinan yang digunakan oleh pembuat film dokumenter. Sehingga dapat diperoleh telaah tentang film

dokumenter atau isu tentang kemiskinan di perkotaan secara komprehensif dan mendalam.

5.2.2 SARAN PRAKTIS

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberi referensi atau pandangan lain bagi Pemerintah Jakarta dalam hal pembuatan kebijakan. Pemerintah Jakarta diharapkan lebih mendengar aspirasi warganya agar diperoleh kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindarkan warga Jakarta menjadi korban kemiskinan secara struktural karena implementasi kebijakan yang salah.

Peneliti juga berharap pembuat film dokumenter lebih sering mengangkat isu tentang kemiskinan di perkotaan yang lepas dari bias dan norma yang dibentuk oleh media arus utama. Sehingga dapat diperoleh realitas kemiskinan yang berbeda dibandingkan realitas kemiskinan yang dibentuk oleh media arus utama. Selain itu peneliti berharap dengan membaca penelitian ini mampu menambah pengetahuan terkait bentuk-bentuk representasi kemiskinan di perkotaan dalam film dokumenter.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A